



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Implementasi Pancasila Di Dunia kesehatan

Fania Hannisa Putri, Diffa Arzaqiya Putri, Aliya Thalika Aji, Syafira Marwa Al-Qolbu, Alya Miranti, Madinatul Munawaroh, Aulia Febriani, Mustika Dewi, Phathiah Ramadani

Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Mataram

Poltekkes Kemenkes Mataram, Mataram Indonesia, faniaputri808@gmail.com

Poltekkes Kemenkes Mataram, Mataram Indonesia, alikaaji64@gmail.com

Poltekkes Kemenkes Mataram, Mataram Indonesia, alyamiranti353@gmail.com

Poltekkes kemenkes Mataram, Mataram Indonesia, febrianyaulia12@gmail.com

Poltekkes kemenkes Mataram, Mataram Indonesia, diffa01122006@gmail.com

Poltekkes kemenkes Mataram, Mataram Indonesia, madinatulmunawaroh656@gmail.com

Poltekkes kemenkes Mataram, Mataram Indonesia, mustikadewi091007@gmail.com

Poltekkes kemenkes Mataram, Mataram Indonesia, hasanahpatia@gmail.com

Poltekkes kemenkes Mataram, Mataram Indonesia, syafiraalqolbu@gmail.com

Abstrak: Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan. Implementasi nilai-nilai Pancasila di dunia kesehatan mencerminkan tanggung jawab moral dan profesional tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang berkeadilan, berperikemanusiaan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penelitian atau kajian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik pelayanan kesehatan, baik dalam hubungan antar tenaga medis, antara tenaga medis dengan pasien, maupun dalam pengambilan keputusan etis. Metode yang digunakan adalah studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai Ketuhanan mengarahkan tenaga kesehatan untuk bekerja dengan integritas dan keikhlasan; nilai Kemanusiaan menuntun pada pelayanan yang berempati dan menghormati martabat pasien; nilai Persatuan menegaskan pentingnya kerja sama lintas profesi; nilai Kerakyatan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan; serta nilai Keadilan mengarahkan distribusi layanan kesehatan yang merata. Dengan demikian, implementasi Pancasila di dunia kesehatan bukan hanya menjadi pedoman etika, tetapi juga dasar pembentukan karakter profesional tenaga kesehatan yang berorientasi pada kemanusiaan dan kesejahteraan bangsa. Bentuk penerapan nilai pancasila salah satunya pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam pembangunan negara. Setiap nilai sila Pancasila terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap pembentukan etika profesi, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan integritas dan tanggung jawab moral tenaga kesehatan.

Kata kunci: Pancasila, dunia kesehatan, etika profesi, pelayanan kesehatan, nilai kebangsaan.

***Correspondence Address:** faniaputri808@gmail.com

Article History	Received	Revised	Published
	11/14/2025 12:20:00 AM	-	9/30/2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Indonesia termasuk salah satu Negara yang memiliki prinsip sendiri dalam kehidupan berbangsa juga bernegara yang tentunya berbeda dengan bangsa lainnya dan hal itulah yang tentu saja

dapat menjadikan ciri tersendiri bagi bangsa Indonesia yakni dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar Negaranya. Pelajar Pancasila adalah cakupan yang harus dimiliki oleh para pelajar Indonesia dalam menghadapi dunia yang serba digital, kita ketahui bahwa tantangan yang dihadapi generasi muda sekarang sangatlah kompleks. Dunia tontonan yang tiada batas, pasar bebas terus masuk. Dunia persaingan yang sangat luas demi kemajuan tiap individu. Pancasila dipilih sebagai dasar Negara Indonesia sebagai jati diri, sebagai ideologi, dan juga sebagai asas persatuan bangsa Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila menjadi pandangan hidup dalam seluruh aspek kehidupan. Pada saat ini secara dominan Pancasila berperan menjadi tolok ukur dan identitas dalam tata kenegaraan.

Pancasila memiliki peran penting sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dalam membentuk sikap warga negara yang bertanggung jawab. Nilai-nilainya mengarahkan setiap individu untuk bertindak sesuai hati nurani dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama. Dengan begitu, warga negara tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Misalnya, sila kemanusiaan mendorong sikap peduli, sila persatuan menumbuhkan rasa kebersamaan, sila musyawarah mengajarkan pentingnya dialog, dan sila keadilan menekankan perlunya berlaku adil bagi semua. Nilai-nilai tersebut menjadi pegangan agar keputusan yang diambil tidak hanya bijaksana, tetapi juga sesuai dengan nurani dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara.

Berbagai tantangan dalam pelayanan kesehatan, seperti ketimpangan akses, kualitas layanan serta keterjangkauan biaya dan tantangan lainnya bisa diatasi dengan mengimplementasikan nilai-nilai pancasila. Seperti pada sila kedua yang menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi layanan kesehatan, kemudian dalam sila kelima yang mendorong kebijakan dimana dalam kebijakan tersebut ditentukan skala prioritasnya. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat sistem kesehatan bangsa (Tiba et al., 2025). Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang penerapan nilai-nilai pancasila dalam meningkatkan pelayanan kesehatan nasional. Adapun hasil dari kajian ini dapat digunakan sebagai informasi oleh masyarakat, akademisi, pemerintah, serta tenaga kesehatan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dengan berlandaskan oleh penerapan nilai-nilai pancasila.

METODE | METHOD

Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis berbagai referensi ilmiah yang relevan terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dalam meningkatkan pelayanan kesehatan nasional. Literatur diperoleh melalui pencarian di Google Scholar dan jurnal terindeks nasional dengan kata kunci seperti Pancasila dan kesehatan, nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan publik, dan etika profesi tenaga kesehatan. Menurut Zed (2014), studi literatur merupakan metode pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis untuk memperoleh pemahaman teoritis dan mendalam mengenai isu yang dibahas. Metode ini digunakan karena memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi berbagai hasil pemikiran dan temuan ilmiah secara sistematis, tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer di lapangan. Pendekatan ini juga efisien untuk menggambarkan keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila dan praktik pelayanan kesehatan berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang telah teruji validitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Pancasila memberikan landasan bagi pandangan holistik terhadap kesehatan, yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya. Hal ini mencerminkan kekayaan keragaman dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia. Dalam bidang kesehatan, etika pancasila menjadi dasar integritas bagi pemberi pelayan kesehatan, mendorong pelayanan tanpa diskriminasi agama, menegakkan kebenaran dan keadilan, serta memajukan solidaritas. Etika itu sendiri adalah ilmu pengetahuan tentang moral dan perilaku manusia dalam masyarakat. Tujuan penulisan

artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Pancasila sebagai fondasi dalam pelayanan kesehatan di Indonesia.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pelayanan kesehatan nasional menunjukkan peran penting ideologi bangsa sebagai fondasi moral, etika, dan sosial yang memperkuat kualitas serta keadilan layanan kesehatan di Indonesia. Dimulai dari penguatan spiritualitas dan penghormatan terhadap nilai Ketuhanan (sila pertama), pelayanan kesehatan dituntun oleh empati, keikhlasan, dan toleransi antaragama yang tercermin dalam praktik medis yang inklusif. Selanjutnya, nilai kemanusiaan (sila kedua) menjadi dasar profesionalisme yang humanis, di mana pasien diperlakukan dengan penghargaan terhadap martabat dan hak-haknya. Nilai persatuan (sila ketiga) memupuk semangat solidaritas dan gotong royong antarpihak, baik tenaga kesehatan, pasien, maupun masyarakat dalam menghadapi tantangan kesehatan secara kolektif. Sementara itu, prinsip musyawarah (sila keempat) mendorong penyusunan kebijakan kesehatan yang partisipatif dan demokratis, menjamin keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan. Terakhir, sila kelima tentang keadilan sosial menggarisbawahi pentingnya pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

1. Spritual dan Nilai Ketuhanan dalam Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan nasional yang efektif dan berkeadilan memerlukan landasan nilai yang kuat, tidak hanya dari aspek teknis-medis, tetapi juga dari prinsip kebangsaan yang menyatukan masyarakat. Pengintegrasian nilai-nilai dalam kelima sila Pancasila, mulai dari etika spiritual hingga keadilan sosial, diharapkan dapat menjadi pondasi dalam pembentukan sistem kesehatan di Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan global seperti pandemi dan mengurangi kesenjangan akses layanan (Dermawan & Nurchotimah, 2021).

Dalam konteks ini, penerapan nilai-nilai spiritualitas dan toleransi sebagai wujud sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, memegang peranan penting. Nilai spiritualitas mendorong tenaga kesehatan untuk bekerja dengan integritas, keikhlasan, dan empati, sedangkan toleransi menciptakan ruang penghormatan terhadap keberagaman keyakinan dan latar belakang budaya pasien. Hal ini tercermin dalam pelayanan yang inklusif dan tanpa diskriminasi, serta dalam lingkungan kerja yang menjunjung tinggi sikap saling menghargai antarprofesi dan antaragama (Maharani et al., 2024).

Penghormatan terhadap kepercayaan spiritual pasien juga menjadi aspek penting dalam membangun hubungan empati antara tenaga kesehatan dan pasien, misalnya dalam pengambilan keputusan medis atau perawatan di akhir hayat. Di samping itu, nilai-nilai dari sila lainnya, seperti keadilan (sila kedua), gotong royong lintas sektor (sila ketiga), dan musyawarah dalam kebijakan (sila keempat), semuanya mendukung terwujudnya sistem kesehatan yang adil, kolaboratif, dan berkelanjutan. Implementasi konkret dari nilai-nilai ini dapat dilihat dalam berbagai program nasional seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), distribusi vaksin yang merata, serta pengembangan telemedicine yang tetap memperhatikan dimensi spiritual pasien (Romadoni et al., 2024).

2. Kesehatan dan Etika Profesional sebagai Pilar Layanan Kesehatan

Hubungan antara kemanusiaan dan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan merupakan sebuah pondasi untuk menghasilkan sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. Pelayanan kesehatan dengan menerapkan prinsip nilai-nilai yang berlandaskan pada kemanusiaan akan menghasilkan etika profesionalisme dan pelayanan yang lebih humanis kepada pasien. Berdasarkan Sinta et al. (2023), penerapan nilai kemanusiaan oleh petugas rekam medis di Puskesmas Karanganyar berdampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada prosedur, melainkan juga pada aspek kemanusiaan yang merupakan bagian dari sila kedua Pancasila yang menekankan pentingnya perlakuan setara dan penghargaan terhadap martabat manusia. Hal ini akan membentuk pelayanan yang lebih humanis dengan menunjukkan adanya empati dan kepedulian terhadap pasien serta prinsip kesetaraan. Selain itu, penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik medis juga berperan penting dalam mencegah diskriminasi, pelayanan kesehatan yang adil, dan bebas diskriminasi sehingga dapat membangun kepuasan dan kepercayaan pasien terhadap institusi kesehatan (Husni et al., 2024; Maharani et al., 2024).

Penerapan nilai kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan tercermin dari empati, kesabaran, dan kesediaan tenaga kesehatan untuk menempatkan pasien sebagai subjek, bukan sekadar objek medis. Nilai-nilai ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat kerja sama serta

komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien (Nareswari et al., 2024). Penerapan rasa kemanusiaan dapat dituangkan melalui penghargaan terhadap hak-hak dasar pasien, seperti hak untuk mendapat informasi yang jelas, hak atas privasi, dan hak untuk dilayani tanpa prasangka (Maharani et al., 2024). Dengan demikian, implementasi nilai kemanusiaan dapat menjadi fondasi moral yang kokoh dalam membentuk etika publik dan membangun sistem pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan bermartabat (Husni et al., 2024; Nareswari et al., 2024).

Penerapan rasa kemanusiaan dapat dituangkan melalui penghargaan terhadap hak-hak dasar pasien, seperti hak untuk mendapat informasi yang jelas, hak atas privasi, dan hak untuk dilayani tanpa prasangka (Maharani et al., 2024). Dengan demikian, implementasi nilai kemanusiaan dapat menjadi fondasi moral yang kokoh dalam membentuk etika publik dan membangun sistem pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan bermartabat (Husni et al., 2024; Nareswari et al., 2024).

3. Peningkatan Solidaritas dan Gotong Royong dalam Sistem Kesehatan

Penerapan nilai persatuan dalam pelayanan kesehatan akan menghasilkan rasa solidaritas yang memainkan peran penting dalam penguatan sistem kesehatan. Penerapan nilai Pancasila sila ketiga berfungsi sebagai pemersatu dalam sistem kesehatan, menciptakan rasa kebersamaan di antara tenaga medis, pasien, dan masyarakat yang dapat mendorong partisipasi aktif berbagai pihak dalam upaya menjaga kesehatan bersama (Dermawan & Nurchotimah, 2021). Adanya rasa persatuan akan menghasilkan kerjasama dari berbagai pihak seperti pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan swasta dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik melalui perluasan jangkauan pelayanan, pengoptimalan sumber daya, dan pemastian bahwa kebijakan kesehatan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat (Maharani et al., 2024).

Adanya penerapan nilai persatuan juga akan menghasilkan semangat gotong royong yang baik dalam pelayanan kesehatan. Nilai ini tercermin dalam praktik seperti kerja tim antar profesi kesehatan, keterlibatan keluarga dalam perawatan pasien, serta partisipasi masyarakat dalam program kesehatan preventif. Gotong royong tidak hanya meningkatkan efektivitas pelayanan, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab bersama terhadap kesehatan publik (Romadhoni et al., 2024). Hal ini diperkuat oleh Nareswari et al. (2024) yang menemukan bahwa kolaborasi antara tenaga kesehatan dan pasien di RS PKU Muhammadiyah Sukoharjo merupakan bentuk nyata dari persatuan dalam sistem kesehatan. Ketika pasien dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan medis dan edukasi kesehatan, tingkat kepatuhan dan kepercayaan terhadap layanan kesehatan meningkat secara signifikan.

4. Partisipasi masyarakat dan Musyawarah dalam Kebijakan Kesehatan

Dalam sistem pelayanan kesehatan nasional, partisipasi masyarakat dan semangat musyawarah memegang peranan penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan yang mengedepankan musyawarah dan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan itu sendiri, tetapi juga meningkatkan relevansi kebijakan terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Dalam konteks ini, keterlibatan warga dalam proses penyusunan kebijakan menjadi wujud nyata pelaksanaan demokrasi berbasis kearifan lokal (Maharani et al., 2024).

Musyawarah sebagai prinsip dasar dalam penyusunan kebijakan kesehatan juga tidak dapat diabaikan. Proses ini memberikan ruang bagi diskusi yang sehat, pertimbangan multi-perspektif, dan pengambilan keputusan yang mengakomodasi kepentingan bersama. Seperti yang dijelaskan dalam kajian terbaru, nilai musyawarah penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan bersifat representatif dan berkeadilan (Romadhoni et al., 2024).

Di sisi lain, tenaga kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan juga perlu memiliki kesadaran ideologis yang kuat. Dalam menghadapi tantangan globalisasi yang kompleks dan cepat berubah, kesadaran ini penting agar para tenaga kesehatan tetap berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa dalam memberikan pelayanan (Nareswari et al., 2024). Hal ini mencerminkan pentingnya konsistensi antara kebijakan nasional dengan ideologi negara dalam membangun sektor kesehatan yang tangguh dan berdaulat.

5. Keadilan Sosial dan Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan

Nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila menuntut adanya pemerataan akses terhadap pelayanan kesehatan di seluruh penjuru Indonesia. Pemerataan ini bukan hanya sebatas ketersediaan

fasilitas, tetapi juga mencakup kualitas layanan, keterjangkauan biaya, dan tidak adanya diskriminasi. Dalam sebuah studi disebutkan bahwa “sistem yang baik adalah sistem yang mampu mengurangi kesenjangan akses layanan antar kelompok sosial” (Dermawan & Nurchotimah, 2021), yang berarti negara harus hadir untuk menjembatani perbedaan yang terjadi akibat faktor ekonomi maupun geografis.

Pentingnya pelayanan yang dapat diakses oleh semua kalangan juga ditekankan oleh Aprilia et al. (2024), yang menegaskan bahwa akses layanan kesehatan harus merata dan terbuka bagi siapa pun tanpa diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam Pancasila bukan hanya bersifat normatif, melainkan harus diterjemahkan dalam kebijakan operasional yang menjangkau seluruh masyarakat.

Etika pelayanan pun tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai dasar kebangsaan. Keadilan sosial, menurut Husni et al. (2024), seharusnya menjadi pedoman etis dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Dengan menjadikan nilai ini sebagai acuan, pelayanan publik dapat lebih berorientasi pada kemanusiaan dan keberpihakan terhadap kelompok rentan.

Salah satu implementasi nyata dari nilai keadilan sosial dalam sektor kesehatan adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini telah memainkan peran penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang terstandar. Distribusi vaksin secara merata juga menjadi contoh keberhasilan kebijakan berbasis keadilan sosial (Romadoni et al., 2024).

Lebih lanjut, Salakory (2024) mencatat bahwa keberhasilan JKN dalam menurunkan angka kematian di beberapa wilayah merupakan indikator kuat bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima, telah diimplementasikan secara efektif. Ia menyatakan bahwa “penurunan angka kematian merupakan bukti keberhasilan implementasi sila kelima dalam sistem kesehatan nasional”. Dengan demikian, integrasi nilai keadilan sosial dalam kebijakan kesehatan tidak hanya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat legitimasi moral negara sebagai pelindung seluruh rakyatnya. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, menjadi kompas yang mengarahkan pembangunan kesehatan nasional menuju sistem yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Pancasila sebagai dasar negara juga memiliki pengaruh dalam bidang kesehatan, tidak hanya menjadi landasan di bidang politik dan ekonomi. Pancasila merupakan suatu tatanan nilai-nilai dimana nilai-nilai yang ada didalamnya memiliki keterkaitan dengan sistem kesehatan, oleh sebab itu untuk menunjang kesehatan masyarakat secara menyeluruh kita perlu menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan sistem pendekatan kesehatan, diharapkan menghasilkan kebijakan kesehatan masyarakat Indonesia yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan mengarah pada terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Dengan mengadopsi nilai-nilai Pancasila, pelayanan kesehatan diharapkan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, memastikan akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang bermutu, serta menghormati keberagaman budaya dan kebutuhan individu. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam mewujudkan visi pelayanan kesehatan yang merangkul nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, bukan hanya aspek medis yang diperhatikan, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan spiritual dalam memberikan pelayanan yang menyeluruh dan holistik.

UCAPAN TERIMA KASIH | THANK-YOU NOTE

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada selaku dosen mata kuliah Pancasila yang telah memberikan bimbingan, saran, dan koreksi selama penulisan artikel ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang turut membantu dalam proses pengumpulan data dan diskusi. Semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

REFERENSI | REFERENCE

- Aprilia, F., Aqmar, K. D., Ababil, M. A., Cahyani, S. D., Nurranti, S., & Santoso, A. P. A. (2024). Pelayanan Kesehatan Berasaskan Nilai-nilai Pancasila. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 397-402.
- Azarine, M. (2024, January). Pancasila sebagai dasar mewujudkan kesehatan masyarakat: Pancasila sebagai dasar pemikiran dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi* (Vol. 4, No. 1).
- Husni, A. N., Amalia, A., Munatunnisa, H., Saputri, N. W., & Widyaningsih, S. (2024). Pancasila sebagai Fondasi Etika dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 101-107.
- Manurung, A. J., Sijabat, A. S., Situmorang, A. S., Simorangkir, B. G. T., Rumabutar, B. R., Daeli, F., & Sitohang, B. S. (2025). INTEGRASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM ETIKA PROFESI KESEHATAN. *Jurnal Penelitian Ilmu Kesehatan*, 82-87.
- Nurul, N. I., Mustari, M., Kurniawansyah, E., & Alqadri, B. (2024). Dampak penerapan kegiatan Profil Pelajar Pancasila dalam menumbuhkembangkan sikap mandiri siswa di SMAN 2 Mataram. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(1), 481-490.
- Puji Ayu Handayani ., Dinie Anggraeni Dewi (2021, Juni). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara
- Sabina, D., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Implementasinya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9103-9106.